

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMISARIS INDEPENDEN, *LEVERAGE* DAN *SALES GROWTH* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA**

MASRULLAH<sup>1</sup>  
MURSALIM  
MUHAMMAD SU'UN  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the influence of ownership of institutions, independent commissioners, leverage and sales growth on tax avoidance at Manufacturing companies in the Indonesia Stock Exchange. The type of data used in this study is quantitative data in the form of data in the form of numbers in the form of financial statements on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2014 to 2016. While the data analysis method used is multiple linear regression. The population in this study is 154 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The research sample consisted of 18 companies, the period of 2014 to 2016. The sample technique used was purposive sampling. The results of this study indicate that institutional ownership and independent commissioner variables have no significant effect on tax avoidance. While leverage and sales growth variables have a significant effect on tax avoidance carried out on consumer goods sector companies in the period 2014 to 2016.*

**Keywords :** *Institutional Ownership, Independent Commissioners, Leverage, Sales Growth and Tax Avoidance.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, leverage dan sales growth terhadap tax avoidance pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data yang berbentuk angka-angka berupa laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai dengan 2016. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 154 perusahaan. Sampel penelitian sebanyak 18 perusahaan, periode tahun 2014 sampai dengan 2016. Teknik sampel yang digunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan variabel leverage dan sales growth berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance yang dilakukan pada perusahaan sektor barang konsumsi pada periode 2014 sampai dengan 2016.

**Kata-kata Kunci:** *Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Leverage, Sales Growth dan Tax Avoidance*

<sup>1</sup>[masrullah.mn@gmail.com](mailto:masrullah.mn@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang memberikan kontribusi lebih dari 70% total penerimaan negara. Penerimaan negara yang bersumber dari pajak diharapkan dapat digunakan dalam pembiayaan kebutuhan negara dan melakukan pembangunan nasional. Pembiayaan kebutuhan negara dan pembangunan nasional membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak negara melalui sejumlah pembaharuan dan penetapan sistem pemungutan pajak yang tepat. Selama ini Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assesment system*, sistem ini memberikan wewenang kepada setiap wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan sendiri pajak mereka kepada pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kontribusi masyarakat yang lebih tinggi terhadap penerimaan pajak negara. akan memberikan celah kepada setiap wajib pajak untuk melaporkan pajak yang lebih rendah dari seharusnya. Hal ini menyebabkan timbulnya isu penghindaran pajak untuk kepentingan wajib pajak sendiri.

Menurut Jaya, Arafat, dan Kartika (2013) penghindaran pajak di Indonesia dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan tetapi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atas pendapatan yang seharusnya dikenai pajak. Aktivitas penghindaran pajak dalam perusahaan muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan investor dalam perusahaan. Pihak manajemen berkeinginan untuk menekan biaya pajak agar tidak menurunkan laba dalam laporan keuangan sedangkan investor tidak ingin praktik penghindaran pajak dapat mengurangi nilai perusahaan. Dalam melakukan praktik penghindaran pajak ini, manajemen perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain *corporate governance*, karakter eksekutif dan karakteristik perusahaan (Dewi dan Jati, 2014).

Oleh karena itu, pada tahun 1999 dibentuklah Komite Nasional Kebijakan *Governance* sebagai wujud perhatian khusus dari pemerintah dan investor dalam melaksanakan praktek *corporate governance* di Indonesia. ketika konsep tersebut dijalankan dengan pengawasan yang baik dalam perusahaan maka perusahaan tersebut juga memiliki tata kelola yang baik termasuk salah satunya dalam hal pemenuhan kewajiban pajaknya begitupun sebaliknya. metode pengawasan *corporate governance* dilakukan secara *internal* untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal dan *external* seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan, dan pengendalian pasar. Artikel penelitian ini memuat penerapan *corporate governance* akan dilihat dari mekanismenya dengan proksi kepemilikan institusional, dan dewan Komisaris Independen. Selain itu, penerapan *corporate governance* juga dilatar belakangi oleh masalah struktur kepemilikan yang dalam artikel ilmiah ini difokuskan pada struktur kepemilikan institusional. Kepemilikan Institusional adalah kepemilikansaham yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo 2008). Dengan adanya kepemilikan institusional maka akan ada kontrol yang lebih baik berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal.

Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi (UU No.40 Tahun 2007). Dewan Komisaris sendiri terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris non-independen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2004).

Pada penelitian ini, karakteristik perusahaan yang digunakan adalah tingkat pendanaan (*leverage*) dan pertumbuhan penjualan (*sales growth*). *Leverage* dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan peningkatan pertumbuhan penjualan

cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Penelitian dari Budiman dan Setiyono (2012) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap CETR yang merupakan indikator dari adanya aktivitas *tax avoidance*. Penelitian terkait dengan pertumbuhan penjualan yang dilakukan oleh Calvin (2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Laju pertumbuhan suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan dalam kesempatan-kesempatan pada masa yang akan datang (Deitiana, 2011).

Untuk itu, menarik dilakukan sebuah studi terkait dengan Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, *Leverage* dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia.

Adapun Rumusan masalah dengan penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?
2. Apakah komisaris Independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?
4. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia?

## 2. LANDASAN TEORI

### A. Teori Agency (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) dalam Winarsih, Prasetyo dan Syam Kusufi (2014) menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. *Agency theory* mengasumsikan bahwa setiap manusia memiliki sifat egois yaitu mementingkan kepentingan diri sendiri. Pemegang saham akan fokus pada peningkatan nilainya sedangkan eksekutif fokus pada pemenuhan kepentingan pribadi yaitu memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya. Adanya benturan kepentingan antara keduanya inilah yang memicu munculnya *agency theory*, seperti perilaku *tax avoidance* yang dipengaruhi oleh *agency problem* dan terdapat perbedaan kepentingan antara para pihak, satu sisi eksekutif menginginkan peningkatan kompensasi, pemegang saham ingin menekan biaya pajak, kreditur menginginkan perusahaan dapat memenuhi kontrak utang dan membayar bunga, pokok utang tepat waktu

### B. Teori Stakeholder (*Stakeholders' Theory*)

*Stakeholder* adalah semua pihak (internal maupun eksternal) yang memiliki hubungan dengan perusahaan, langsung maupun tidak langsung, dan bersifat mempengaruhi atau dipengaruhi perusahaan. Teori *stakeholder* menyatakan bahwa semua *stakeholder* mempunyai hak untuk mendapat informasi tentang aktivitas perusahaan selama periode tertentu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Dua aspek penting dalam teori *stakeholder* adalah hak (*right*) dan akibat (*effect*). Aspek pertama yaitu hak, pada dasarnya menghendaki bahwa perusahaan dan para manajernya tidak boleh melanggar hak dan menentukan masa depan *stakeholder*. Aspek kedua yaitu akibat, menghendaki agar manajemen perusahaan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan.

Teori ini memberi alasan bagi perusahaan untuk melaksanakan *GoodCorporate Governance* (GCG), sebab tujuan utama teori *stakeholder* adalah untuk membantu eksekutif perusahaan mengerti lingkungan mereka dan melakukan pengelolaan lebih efektif dengan hubungan-hubungan yang ada di lingkungan perusahaan mereka. Tujuan yang lebih luas bagi eksekutif perusahaan adalah membantu dalam meningkatkan nilai dari aktivitas-aktivitas mereka dan meminimalkan kerugian bagi *stakeholder*.

### C. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pasal 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi yang bersifat memaksa itu menimbulkan perlawanan dari wajib pajak, terlebih sejak tahun 1984, Indonesia merubah sistem pemungutan perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* sehingga tanggung jawab wajib pajak menyangkut kesadaran untuk memenuhi kewajibannya menjadi semakin besar (Carolina dan Simanjuntak, 2011 dalam Natalia dan Debbianita, 2014).

Menurut Mardiasmo (2013), penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Dengan kata lain merupakan suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Definisi penghindaran pajak diatas menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya pengurangan atau penghematan pajak sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan yang ada. Dalam penelitian Hoque, *et al.* (2011) dalam Puspita dan Harto (2014) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu:

- 1) Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
- 2) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
- 3) Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
- 4) Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan dibawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
- 5) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industry manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

### D. Corporate Governance

*Corporate governance* atau yang dikenal dengan tata kelola sebuah perusahaan muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelola perusahaan yang dapat menimbulkan *agency problem*. *Agency problem* adalah konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemilik perusahaan. Sehingga memerlukan sistem pemantauan serta pengawasan yang dikenal dengan istilah tata kelola perusahaan (*corporate governance*).

Definisi *Corporate Governance* (CG) yang dikemukakan oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) dalam Jaya, Arafat dan Kartika (2013) sebagai berikut: "Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board*, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. *Corporate governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga

mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efisien".

Prinsip CG di Indonesia dengan Keputusan Menteri BUMN No. Kep- 16/MMBU/2012 tentang penerapan praktik good corporate governance pada BUMN pada Bab II pasal 3 meliputi lima prinsip yaitu: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness.

Kehadiran CG yang baik bagi suatu perusahaan akan menunjang aktivitas operasional, selain itu mekanisme pelaksanaan CG suatu perusahaan harus menjadi perhatian utama perusahaan demi kelancaran kegiatan dalam perusahaan. Mekanisme CG yang baik memiliki keterkaitan dengan kemakmuran perusahaan dan para pemegang saham, sehingga penerapannya diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan. Dalam penelitian empiris, para peneliti terdahulu melakukan pengukuran CG dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) variabel yaitu kepemilikan institusional dan Komisaris Independen.

### **1. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikansaham yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo 2008). Kepemilikansaham institusional adalah prosentasesaham yang dimiliki institusi dan kepemilikan blockholder, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider atau manajerial. Terdapat beberapa kelebihan Kepemilikan institusional antara lain: (1) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi. (2) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi didalam perusahaan.

Kepemilikan Institusional dapat diukur dengan cara jumlah kepemilikan saham oleh investor institusi terhadap total jumlah saham yang beredar (Khurana dan Moser 2009; Annisa dan Kurniasih 2012). Investor institusi yang dimaksud adalah perusahaan lain yang memiliki saham pada korporasi tertentu dimana indikatornya adalah persentase saham yang dimiliki investor institusi tersebut dibandingkan dengan jumlah saham korporasi yang beredar.

### **2. Komisaris Independen**

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2004). Pengukuran dewan komisaris independen dengan cara menjumlah semua anggota dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan. Jika dalam laporan keuangan tidak dicantumkan berapa jumlah anggota dewan komisaris independen, maka

diasumsikan perusahaan tersebut memiliki komisaris independen sebanyak 1 orang, karena di dalam undang-undang perseroan terbatas No. 40 tahun 2007 mewajibkan semua perusahaan untuk memiliki dewan komisaris independen.

Pohan (2008) mendefinisikan Komisaris Independen sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris serta tidak menjabat sebagai Direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Menurut Peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris. Purwaningtyas (2011) menyebutkan Jumlah dewan komisaris independen yang semakin banyak menandakan bahwa dewan komisaris independen melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan yang semakin baik.

## **B. Karakteristik Perusahaan**

Menurut Hardiningsih (2008:67) menggolongkan karakteristik perusahaan dalam 3 pendekatan. Karakteristik perusahaan tersebut berkaitan dengan struktur, kinerja, dan pasar. Struktur perusahaan meliputi ukuran (*size*) perusahaan, kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban (*leverage*) dan korelasi antara pengembalian tahunan dan pendapatan. Kinerja (*performance*) perusahaan meliputi likuiditas perusahaan dan laba (profitabilitas dan penjualan). Sedangkan dari pendekatan pasar meliputi faktor-faktor kualitatif seperti tipe industri, tipe auditor dan status perusahaan. Pada penelitian ini, karakteristik perusahaan yang digunakan adalah tingkat pendanaan (*leverage*) dan Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*).

### **1. Leverage**

*Leverage* dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan *asset* dan sumber dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan *asset* (aktiva) atau dana tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan potensial bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan. *Leverage* pada perusahaan ada dua macam, yaitu *operating leverage* dan *financial leverage* (Martono dan Harjito, 2006:295).

*Leverage* juga didefinisikan sebagai rasio dari hutang jangka panjang terhadap total aktiva (Kim and Zhang, 2013:43). Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Penelitian ini menggunakan total hutang dibagi dengan total aktiva dalam perhitungan *leverage*. Penggunaan proksi tersebut dikarenakan hutang yang dilakukan perusahaan untuk tujuan usaha atau lainnya bukan hanya terdiri dari hutang jangka panjang saja, tapi juga hutang jangka pendek. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan total hutang dibagi dengan total aktiva dalam menghitung *leverage*.

### **2. Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*)**

Swastha dan Handoko (2001), "Pertumbuhan atas penjualan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan/atau jasa perusahaan tersebut, dimana

pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan". Pertumbuhan penjualan mencerminkan manifestasi keberhasilan investasi masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan juga merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Laju pertumbuhan suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan dalam kesempatan-kesempatan pada masa yang akan datang (Deitiana, 2011). Pertumbuhan penjualan adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan tinggi, maka akan mencerminkan pendapatan meningkat. Perusahaan yang penjualannya tumbuh secara cepat akan perlu untuk menambah aktiva tetapnya, sehingga pertumbuhan perusahaan yang tinggi akan menyebabkan perusahaan mencari dana yang lebih besar (Supriyanto dan Falikhatun, 2008).

Menurut (Deitiana, 2011) pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan adalah tingkat dimana penjualan perusahaan dapat tumbuh tergantung pada bagaimana dukungan aset terhadap peningkatan penjualan. Selain melalui tingkat penjualan, pertumbuhan perusahaan dapat juga diukur dari pertumbuhan aset atau dengan kesempatan investasi yang diprosikan dengan berbagai macam kombinasi nilai set kesempatan investasi (*investment opportunity set*). Dengan demikian dapat diketahui bahwa suatu perusahaan dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih baik jika terdapat peningkatan yang konsisten dalam aktivitas utama operasinya.

## Kerangka Konseptual

### Definisi Operasional dan Pengukurannya

#### 1. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

##### a. Pengertian Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Mardiasmo (2013), penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Dengan kata lain merupakan suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

##### b. Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Dyreng at al., (2010) penghindaran pajak diukur melalui CASH ETR (*cash effective tax rate*) laba sebelum pajak. Semakin besar CASH ETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Adapun rumus untuk menghitung CASH ETR adalah sebagai berikut:

$$\text{CASH ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$



## 2. Corporate Governance

*Corporate governance* atau yang dikenal dengan tata keola sebuah perusahaan muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelola perusahaan yang dapat menimbulkan *agency problem*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (Dua) variabel yaitu kepemilikan institusional, dan komisaris independen.

### a) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional dinyatakan dalam presentase yang diukur dengan membagi kepemilikan saham institusional dengan total saham beredar.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Kepemilikan Saham Institusional}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

### b) Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG,2004). Pengukuran dewan komisaris independen dengan cara menjumlah semua anggota dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan. Jika dalam laporan keuangan tidak dicantumkan berapa jumlah anggota dewan komisaris independen, maka diasumsikan perusahaan tersebut memiliki komisaris independen sebanyak 1 orang, karena di dalam undang-undang perseroan terbatas No. 40 tahun 2007 mewajibkan semua perusahaan untuk memiliki dewan komisaris independen.

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Komisaris}}$$

## 3. Karakteristik Perusahaan

Karakteristik perusahaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya jenis usaha atau industri, tingkat *likuiditas*, *profitabilitas* perusahaan, dan *sales growth*. Pada penelitian ini, karakteristik perusahaan yang digunakan adalah tingkat pendanaan (*leverage*) dan pertumbuhan penjualan (*sales growth*).

### a) Leverage

*Leverage* merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Data *leverage* disajikan dalam skala rasio dengan lambang LEV. *Leverage* diukur dengan menjumlahkan utang jangka panjang dan jangka pendek kemudian dibagi dengan total aset (Dyrenge *et al.*, 2010) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Asset}}$$

### b) Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*)

Pertumbuhan penjualan yang diperoleh perusahaan akan berpotensi meningkatkan pendapatan dikenai pajak. Manajemen sebagai pengambil keputusan disini mampu untuk mengambil kebijakan pajak agresif demi memperbaiki laporan keuangan mereka. Semakin besar penjualan yang diperoleh suatu perusahaan berarti akan semakin besar pendapatan dikenai pajak. Logika ini didukung oleh penelitian sebelumnya menyatakan adanya hubungan signifikan antara Sales Growth terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2010). Pertumbuhan penjualan dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\text{Sales Growth}_t = \frac{\text{Penjualan Periode}_t - \text{Penjualan Periode}_{t-1}}{\text{Penjualan Periode}_{t-1}}$$

### 3. METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif (*Quantitative approach*) dengan jenis penelitian *explanatory research*. Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Juli sampai dengan September 2018.

#### Data dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan mendownload melalui situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

#### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu penelitian pustaka melalui buku, jurnal, skripsi, internet dan perangkat lain yang berkaitan dengan karakteristik perusahaan dan kepemilikan keluarga dan penelitian lapangan yang bersumber dari bersumber dari *IDX Fact Book* dan laporan tahunan perusahaan dalam sektor manufaktur tahun 2014-2016 yang telah dipublikasikan secara lengkap di Bursa Efek Indonesia (BEI).

#### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 sampai dengan 2016 dengan total perusahaan manufaktur sebanyak 154 yang terbagi kedalam tiga sub industri diantaranya Industri dasar dan kimia sebanyak 69, aneka industri sebanyak 43 dan Industri Barang Konsumsi sebanyak 42. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *Purposive Sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 18 perusahaan yang disajikan dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1. Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1.	Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	154
2.	Perusahaan yang tidak termasuk dalam sub industri barang konsumsi	(112)
3.	Data laporan keuangan tidak tersedia berturut-turut untuk tahun pelaporan dari 2014-2016	(10)
4.	Perusahaan mengalami kerugian untuk tahun pelaporan 2014-2016	( 6 )
5.	Perusahaan yang tidak mengalami pertumbuhan penjualan	( 8 )
	<b>Jumlah Sampel</b>	<b>18</b>
	<b>Tahun Pengamatan</b>	<b>3</b>
	<b>Total Sampel yang digunakan dalam penelitian</b>	<b>54</b>

Sumber : Data yang diolah

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yakni : analisis deskriptif berupa nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum dan Analisis Uji Asumsi Klasik berupa uji normalitas, uji Multikolonieritas, Uji Heterokedastisitas, Uji Autokorelasi serta Uji Hipotesis Penelitian, Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F), Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t Statistik), Koefisien Determinan (*Adjusted R2*), Uji r (*Koefisien korelasi*).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Hasil Penelitian

Hasil perhitungan analisis deskriptif yang telah dilakukan tersaji dalam tabel berikut.

Tabel.2 Statistik Deskriptif  
Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional	54	,65	,33	,98	,7390	,17129
Komisaris Independen	54	,60	,20	,80	,4324	,13238
Leverage	54	,65	,07	,72	,3798	,17289
Sales Growth	54	,40	-,07	,33	,1089	,07452
Tax Avoidance	54	,32	,07	,39	,2551	,05017
Valid N (listwise)	54					

Sumber : Data sekunder diolah yang diolah 2018

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 2, Kepemilikan Institusional mempunyai nilai minimum sebesar 0,33 sedangkan nilai maksimum sebesar 0,98. Nilai rata-rata sebesar 0,7390 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh cukup tinggi. Sedangkan pada standar deviasi Kepemilikan Institusional adalah 0,17129. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar atau kecilnya konsentrasi Kepemilikan Institusional akan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak oleh perusahaan, dimana apabila semakin besarnya konsentrasi kepemilikan saham jangka pendek (short-term Shareholder) institusional, maka akan meningkatkan penghindaran pajak, tetapi apabila semakin besar konsentrasi kepemilikan saham jangka panjang (longterm shareholder) maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan penghindaran pajak.

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 2, Komisaris Independen mempunyai nilai minimum sebesar 0,20 sedangkan nilai maksimum sebesar 0,80. Nilai rata-rata sebesar 0,4324 menunjukkan bahwa Komisaris Independen berpengaruh cukup tinggi. Sedangkan Pada Standar deviasi Komisaris Independen adalah 0,13238. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila tidak ada pengawas dari Komisaris Independen, maka akan semakin besar kemungkinan eksekutif yang lain dapat memanipulasi posisi mereka dengan mendapatkan kontrol yang penuh atas remunerasi mereka sendiri dan mengamankan jabatan mereka, sehingga dapat merugikan pemegang saham. Sebaliknya, semakin besar Komisaris Independen, maka akan dapat meningkatkan kinerja dan kekayaan pemegang saham.

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 2, *Leverage* mempunyai nilai minimum sebesar 0,07 sedangkan nilai maksimum sebesar 0,72. Nilai rata-rata sebesar 0,3798 menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh cukup tinggi. Sedangkan Pada Standar deviasi *leverage* adalah 0,17289. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika perusahaan lebih banyak mengandalkan pembiayaan dari hutang dari pada pembiayaan yang berasal dari ekuitas untuk operasinya, maka perusahaan akan memiliki ETR yang lebih rendah. Hal ini karena perusahaan yang mempunyai tingkat hutang yang lebih tinggi, akan membayar bunga pajak yang lebih tinggi sehingga membuat nilai ETR menjadi lebih rendah.

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 2, *Sales Growth* mempunyai nilai minimum sebesar -0,07 sedangkan nilai maksimum sebesar 0,33. Nilai rata-rata sebesar 0,1089

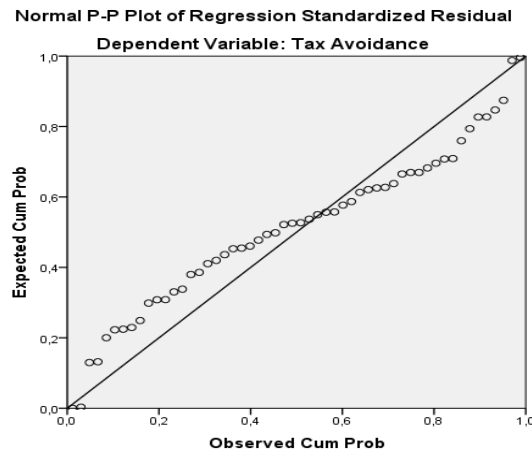
menunjukkan bahwa *Sales Growth* berpengaruh cukup tinggi. Sedangkan Pada Standar deviasi *Sales Growth* adalah 0,7452. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. Sebaliknya bila pertumbuhannya menurun perusahaan akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya.

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 5, *Tax Avoidance* mempunyai nilai minimum sebesar 0,07 sedangkan nilai maksimum sebesar 0,39. Nilai rata-rata sebesar 0,2551, Sedangkan pada Standar deviasi *Tax Avoidance* adalah 0,5017.

## 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

### a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, *error* yang dihasilkan mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas data digunakan grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* yang hasil pengujiannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 1. Hasil Uji Normalitas**

Sumber : Data yang diolah, 2018

Berdasarkan gambar 1 terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

### b. Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel independennya, maka hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya menjadi terganggu. Untuk menguji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai VIF (*Variance Inflation Faktor*). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas (Sunjoyo, dkk., 2013). Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kepemilikan Institusional	.981	1.019
Komisaris Independen	.790	1.226
Everage	.673	1.485
Sales Growht	.696	1.437

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : Data yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 3, terlihat bahwa variabel Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, *Leverage* dan *Sales Growht* memiliki nilai tolerance diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Hal ini berarti dalam model persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas sehingga data dapat digunakan dalam penelitian ini.

c. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mengetahui apakah terdapat adanya autokorelasi di dalam model regresi yang digunakan, maka terlebih dahulu harus diuji dengan menggunakan Uji Autokorelasi *Durbin-watson* yang dapat dilihat pada hasil pengujian regresi berganda. Suatu persamaan regresi dikatakan telah memenuhi asumsi bahwa tidak terdapat adanya autokorelasi dalam persamaan regresi jika nilai dari Uji Durbin-Watson adalah di antara  $2 - d_U < DW < 2 + d_U$ . Hasil uji autokorelasi disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4. Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	<b>,373<sub>a</sub></b>	<b>,139</b>	,069	,04841	,139	1,978	4	49	<b>,113</b>	2,000

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3

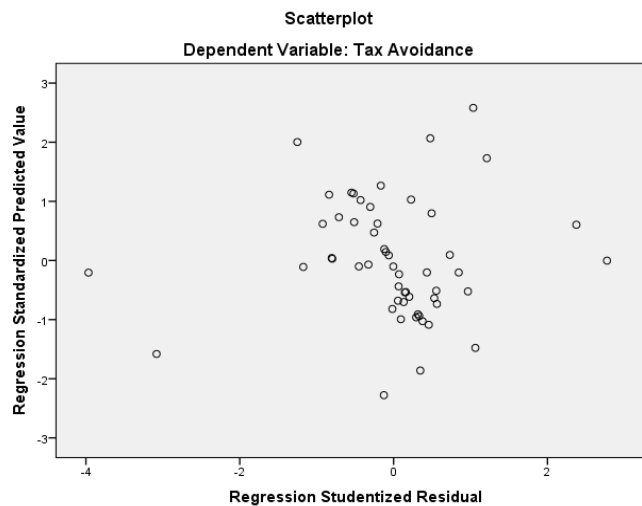
b. Dependent Variable: Y

Sumber : data yang diolah 2018

Dari tabel di atas ternyata koefisien *Durbin-Watson* besarnya 2,000, dalam tabel DW untuk  $k = 5$  dan  $n = 54$ . Sedangkan nilai batas bawah ( $d_l$ ) sebesar 1,40693 dan nilai batas atas ( $d_u$ ) sebesar 1,72339. Yang dimana nilai DW berada diantara  $d_U < DW < 4-d_U$  ( $1,72339 < 2,000 < 2,27661$ ) dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam regresi antara variabel bebas Kepemilikan Institusional ( $X_1$ ), Komisaris Independen ( $X_2$ ), *Leverage* ( $X_3$ ) dan *Sales Growth* ( $X_4$ ) terhadap Tax Avoidance ( $Y$ ) tidak terjadi autokorelasi pada persamaan regresi.

d. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians pada residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode *scatterplot* di mana penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta arah penyebarannya berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Sumber : Data yang diolah, 2018

Berdasarkan gambar 2 grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang jelas dalam penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi Tax Avoidance dengan variabel yang mempengaruhi yaitu Kepemilikan Institusional ( $X_1$ ), Komisaris Independen ( $X_2$ ), *Leverage* ( $X_3$ ) dan *Sales Growth* ( $X_4$ ).

### 3. Hasil Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda.

**Tabel 5. Model Persamaan Regresi**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,286	,037		7,704	,000
X1	-,001	,039	-,003	-,020	,984
<b>X2</b>	-,106	,057	-,280	-1,877	,066
<b>X3</b>	,112	,047	,386	2,390	,021
<b>X4</b>	-,247	,107	-,367	-2,307	,025

Sumber : Data yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:

$$Y = 0,286 - 0,001X1 - 0,106X2 + 0,112X3 - 0,247X4$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta 0,286 adalah ini menunjukkan bahwa, jika variabel independen (Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, *leverage* dan *sales growth*) bernilai nol (0), maka nilai variabel dependen (*tax avoidance*) sebesar 0,286 satuan.
- 2) Koefisien regresi Kepemilikan Institusional adalah -0,001 dan bertanda negatif memiliki pengertian jika diasumsikan variabel independen lainnya konstan dan kepemilikan institusional mengalami kenaikan sebesar 1% maka mengakibatkan penurunan penghindaran pajak sebesar -0,001.
- 3) Koefisien regresi *komisaris independen* adalah -0,106 dan bertanda negatif memiliki pengertian jika diasumsikan variabel independen lainnya konstan dan komisaris independen mengalami kenaikan sebesar 1% maka mengakibatkan penurunan penghindaran pajak sebesar -0,106.
- 4) Koefisien regresi *leverage* adalah 0,112 dan bertanda positif memiliki pengertian jika diasumsikan variabel independen lainnya konstan dan *leverage* mengalami kenaikan sebesar 1% maka mengakibatkan kenaikan penghindaran pajak sebesar 0,112.
- 5) Koefisien regresi *sales growth* adalah -0,247 dan bertanda negatif memiliki pengertian jika diasumsikan variabel independen lainnya konstan dan *sales growth* mengalami kenaikan sebesar 1% maka mengakibatkan penurunan penghindaran pajak sebesar -0,247.



b. Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.

**Tabel 6. Hasil Uji R<sup>2</sup>**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin - Watson
					R Square Change	F Change	df 1	df 2	Sig. F Change	
1	<b>,373<sub>a</sub></b>	<b>,139</b>	,069	,04841	,139	1,978	4	49	<b>,113</b>	2,000

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data yang diolah, 2018

Pada Tabel 6 Nilai Adjusted R Square ( R<sup>2</sup> ) sebesar 0,069 atau 6,9% artinya Variasi Variabel kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, *Leverage dan Sales Growth*, mampu menjelaskan sebesar 6,9% Variasi Variabel Tax Avoidance dan 93,1% dijelaskan oleh Variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

c. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t yaitu dengan melihat nilai signifikansi t hitung, Jika nilai signifikansi < dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,286	,037		7,704	,000
	X1	-,001	,039	-,003	-,020	,984
	<b>X2</b>	-,106	,057	-,280	-1,877	,066
	<b>X3</b>	,112	,047	,386	2,390	,021
	<b>X4</b>	-,247	,107	-,367	-2,307	,025

Sumber : data yang diolah, 2018

Melalui statistik uji-t yang terdiri dari Kepemilikan Institusional( $X_1$ ), Komisaris Independen( $X_2$ ), *Leverage* ( $X_3$ ) dan *Sales Growth* ( $X_4$ ) dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap *Tax Avoidance*( $Y$ ).

#### 1) Pengujian Hipotesis Pertama ( $H_1$ )

Tabel 7 menunjukkan bahwa *Kepemilikan Institusional* memiliki tingkat signifikan sebesar 0,984 yaitu lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti  **$H_1$  ditolak** sehingga dapat dikatakan bahwa *kepemilikan Institusional* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*. Nilai  $t$  yang bernilai -0,020 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat negatif terhadap variabel dependen.

#### 2) Pengujian Hipotesis Kedua ( $H_2$ )

Tabel 7 menunjukkan bahwa *Komisaris Independen* memiliki tingkat signifikan sebesar 0,066 yaitu lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti  **$H_2$  ditolak** sehingga dapat dikatakan bahwa *Komisaris Independen* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Nilai  $t$  yang bernilai -1,877 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat Negatif terhadap variabel dependen.

#### 3) Pengujian Hipotesis Ketiga ( $H_3$ )

Tabel 7 menunjukkan bahwa *Leverage* memiliki tingkat signifikan sebesar 0,021 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti  **$H_3$  diterima** sehingga dapat dikatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Nilai  $t$  yang bernilai 2,390 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

#### 4) Pengujian Hipotesis Keempat ( $H_4$ )

Tabel 7 menunjukkan bahwa *Sales Growth* memiliki tingkat signifikan sebesar 0,025 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti  **$H_4$  diterima** sehingga dapat dikatakan bahwa *sales growth* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Nilai  $t$  yang bernilai -2,307 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat negatif terhadap variabel dependen.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, *leverage* dan *sales growth terhadap tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh *Kepemilikan Institusional* terhadap *tax avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini dikarenakan terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan mengapa besarnya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pertama, kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi diluar kepemilikan saham dewan komisaris perusahaan, dimana pemilik institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan namun demikian bisa saja pemilik institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas mereka sehingga ada atau tidaknya kepemilikan institusional tetap saja *tax avoidance* terjadi. Kedua, kepemilikan institusional cenderung untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka terutama pada keuntungan atau laba yang akan mereka peroleh pada perusahaan sehingga semua kegiatan yang akan merugikan perusahaan termasuk adanya pajak agresif yang akan dilakukan perusahaan, jika kegiatan itu menguntungkan bagi kesejahteraan pemilik institusional maka mereka akan tetap mendukung setiap kegiatan atau kebijakan yang akan dilakukan perusahaan

sehingga besar atau kecilnya kepemilikan institusional maka semakin mengurangi tindakan *tax avoidance*. Ketiga, pemilik institusional kurang peduli dengan citra perusahaan asalkan itu bisa memaksimalkan kesejahteraan mereka walaupun adanya perilaku manajer dalam hal mengambil suatu keputusan terutama dalam hal pajak yaitu tindakan *tax avoidance*.

Keberadaan kepemilikan institusional dalam teori *Stakeholder (Stakeholders' Theory)* mengatakan bahwa hak suara yang dimiliki kepemilikan institusional mampu memaksa manajer atau eksekutif untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri, disisi lain kepemilikan institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional sehingga fokusnya hanya pada manajemen laba. Meskipun secara teori kepemilikan institusional memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan dimana kehadiran kepemilikan institusional mampu mempengaruhi kebijakan manajemen terkait dengan *tax avoidance* dikarenakan kepemilikan memiliki hak dalam pengendalian terhadap aktivitas perusahaan sehingga diyakini bahwa kehadiran kepemilikan institusional yang tinggi diharapkan mampu menekan kebijakan manajemen yang berhubungan dengan pajak. Ini juga merupakan bentuk perwujudan pelaksanaan *good corporate governance* dimana pihak eksekutif perusahaan diharapkan mampu dan mengerti lingkungan perusahaan sehingga pengelolaannya bisa lebih efektif dan bisa meminimalkan kerugian bagi stacholder. Disisi lain kebijakan pajak agresif terkait banyaknya kepemilikan institusional baik oleh pemerintah swasta, asuransi, investor maupun bank tidak mempengaruhi kewajiban perpajakannya karena pemerintah memberikan keringanan melalui undang-undang *tax amnesty* baru-baru ini sehingga pada saat melakukan penelitian data menunjukkan bahwa kepemilikan institusional itu tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurul Hidayah (2015), Dewi dan Jati (2014). Bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Pemilik institusional memiliki pilihan untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional, terkonsentrasinya struktur kepemilikan belum tentu mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas sikap *opportunities*nya dalam melakukan manajemen laba (Isnanta, 2008 dalam Fadhillah, 2014).

## 2. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *tax avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini membuktikan bahwa banyak atau sedikit proporsi komisaris independen ternyata tidak berpengaruh terhadap perilaku agresif pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen. Disisi lain tidak semua anggota dewan Komisaris Independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan *tax avoidance*. Kemampuan Komisaris Independen dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengendalikan dewan komisaris secara keseluruhan. Dewan Komisaris Independen kurang tanggap dalam memperhatikan ada atau tidaknya tindakan *tax avoidance* atau pajak agresif dalam perusahaan sehingga melalaikan kewajibannya kepada negara terutama pajak. Dewan komisaris independen secara pro aktif dapat mendorong pihak manajemen untuk mematuhi atau tidak mematuhi peraturan perundangan yang berlaku sehingga kehadiran komisaris independen ternyata tidak memiliki pengaruh terhadap pajak yg dilakukan oleh manajemen karena pengawasan tdk dilakukan secara profesional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Silvia Ratih Puspita, Puji Harto (2014). Tidak adanya hubungan yang signifikan antara persentase komisaris independen dengan penghindaran pajak disebabkan peran komisaris independen yang tidak signifikan dalam pengambilan keputusan pajak dalam perusahaan di Indonesia. Hal ini dapat juga disebabkan mekanisme komisaris independen dalam tata kelola perusahaan yang tidak efektif dalam mengurangi masalah agensi (Arifin dan Rachmawati, 2006), sehingga komisaris independen tidak dapat mengarahkan jajaran manajer yang lain untuk bertindak sesuai kepentingan terbaik pemegang saham.

### 3. Pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini berarti semakin besar utang yang dimiliki oleh perusahaan maka laba kena pajak menjadi lebih kecil karena insentif pajak terhadap bunga utang menjadi semakin besar. Implikasi meningkatnya utang adalah adanya peningkatan terhadap biaya hutang yang dapat menyebabkan laba kena pajak menurun sehingga beban pajak perusahaan juga menurun. Hal ini terkait dengan teori agensi yang menyatakan bahwa pemegang saham senantiasa menginginkan pajak yang dibayarkan itu lebih rendah sehingga sedapat mungkin perusahaan mampu menekan jumlah pajak yang dibayarkan, atau bisa dikatakan bahwa berutang adalah hal yang sengaja dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak (perusahaan tersebut agresif terhadap pajak). Di sisi lain, utang yang tinggi membantu perusahaan dalam mengoptimalkan dana sebagai ukuran kinerja perusahaan. Selanjutnya, pengguna utang yang berasal dari sumber dana eksternal yang berakibat munculnya biaya bunga dimana beban bunga yang muncul oleh perusahaan digunakan sebagai insentif pajak yang akan mempengaruhi laba kena pajak yang artinya semakin tinggi pengguna utang dari pihak eksternal maka semakin tinggi beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan sehingga ini mengindikasikan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Dalam hal ini, perusahaan dapat melakukan berbagai cara salah satunya adalah dengan menerbitkan obligasi untuk pembiayaan aktivitas operasional perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian I Made dan Putu Agus(2016), bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang berhutang akan memberikan hasil kinerja yang baik dengan dibuktikan dari perolehan laba yang lebih baik daripada perusahaan yang tidak berhutang. Perusahaan akan menunjukkan keadaan laba yang baik agar perusahaan tidak dipandang kurang sehat oleh kreditur karena masih terikat dengan kontrak utang. Utang dapat meningkatkan nilai perusahaan, namun apabila penggunaan utang dengan jumlah yang besar maka akan menimbulkan risiko yang dihadapi perusahaan juga akan besar, sehingga pihak manajemen akan bertindak hati-hati dan tidak mengambil risiko atas utang yang tinggi tersebut untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Tingginya tingkat *leverage* akan menurunkan tingkat *tax avoidance* karena semakin tinggi *leverage* maka perusahaan cenderung meningkatkan laba (Watts dan Zimmerman, 1986).

### 4. Pengaruh *Sales Growth* terhadap *tax avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini berarti bahwa pada umumnya setiap perusahaan sudah pasti menginginkan keuntungan atau laba yang besar dari kegiatan operasionalnya atau dengan kata lain tidak ada perusahaan yang menginginkan kerugian sehingga *principal* memberikan tugas kepada *agen* untuk mengelola laba yang diperoleh dari penjualan tersebut. *Sales growth* yang baik didalam suatu perusahaan akan menyebabkan ukuran perusahaan menjadi besar, dimana semakin besarnya ukuran perusahaan akan

menyebabkan total asset perusahaan semakin besar, keadaan ini yang akan menyebabkan perusahaan harus mempertahankan citra dan reputasi perusahaan dimata publik, untuk tetap bisa eksis di dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, yang akhirnya perusahaan memilih tidak melakukan penghindaran pajak akan tetapi lebih memilih patuh, terlebih lagi aturan perpajakan yang semakin ketat, artinya, perusahaan sedang tumbuh penjualannya beserta dilakukan dengan efisien maka akan memperoleh keuntungan yang besar oleh karena itu tidak perlu melakukan penghindaran pajak. Disisi lain perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar sehingga memiliki kemampuan untuk membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wastam Wahyu Hidayat (2018) bahwasales *growth* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Dikatakan semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka semakin berkurang aktivitas *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar dan mampu untuk melakukan pembayaran pajak.

Setiap perusahaan pasti menginginkan keuntungan atau laba yang besar dari kegiatan operasionalnya. Dengan modal yang besar berarti pengembalian yang harus mereka dapatkan juga diharapkan besar, tidak ada perusahaan yang menginginkan kerugian. *Principal* memberikan tugas kepada *agen* untuk mengelola laba yang diperoleh dari penjualan tersebut, oleh karena hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya manajemen laba yang berakhir pada tindakan penghindaran pajak.

## 5. KESIMPULAN

### Simpulan

Simpulan dari penelitian mengenai analisis pengaruhKepemilikan Institusional, Komisaris Independen, *Leverage dan Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengambil data dari tahun 2014-2016 sebagai berikut :

1. Kepemilikan Institusional menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2016. Artinya jika semua kegiatan itu menguntungkan bagi kesejahteraan pemilik institusional maka mereka akan tetap mendukung setiap kegiatan atau kebijakan yang akan dilakukan perusahaan sehingga besar atau kecilnya kepemilikan institusional tidak akan mempengaruhi tindakan *tax avoidance*.
2. Komisaris Independen menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2016. Artinya tidak semua anggota Dewan Komisaris Independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan *tax avoidance*.
3. *Leverage* menunjukkan pengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2016. Artinya semakin besar utang yang dimiliki oleh perusahaan maka laba kena pajak menjadi lebih kecil karena insentif pajak terhadap bunga utang menjadi semakin besar.
4. *Sales Growth* menunjukkan pengaruh negatif dan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2016. Artinya jika pertumbuhan penjualan naik, maka dapat

menurunkan penghindaran pajak dalam suatu perusahaan, dimana perusahaan yang sedang tumbuh penjualannya serta dilakukan dengan efisiensi maka akan memperoleh keuntungan yang besar oleh karena itu tidak perlu melakukan penghindaran pajak.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan perusahaan mengenai tax avoidance, sehingga manajemen perusahaan bisa merancang mekanisme pelaksanaan kelanjutannya dengan baik, dengan tidak melakukan perencanaan pajak yang illegal sehingga perusahaan tidak melakukan kecurangan pajak (*tax evasion*) yang dapat merugikan Negara dan dapat mencoreng reputasi perusahaan tersebut di mata publik.
2. Bagi investor, sebaiknya dalam pengambilan keputusan investasi untuk mengkaji terlebih dahulu bagaimana kinerja suatu perusahaan dan tetap mematuhi peraturan tentang perpajakan, penghindaran pajak bukan hal yang wajar tetapi selalu dilakukan. *Tax avoidance* akan memberikan dampak yang kurang baik untuk kedua belah pihak yang bersangkutan baik dari pihak investor, perusahaan maupun pemerintah.
3. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengindikasikan perusahaan - perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, sehingga dapat merumuskan kebijakan pencegahan atas tindakan penghindaran pajak tersebut agar kelemahan dalam undang-undang perpajakan dapat diminimalisir dan pada akhirnya penerimaan negara juga meningkat.
4. Bagi peneliti selanjutnya
  - a. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan Manufaktur yang bergerak dibidang sub konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Diharapkan untuk dapat menggunakan perusahaan dengan sektor yang berbeda.
  - b. Dalam penelitian ini, nilai  $R^2$  sebesar 0,069 atau 6,9% artinya Variasi Variabel kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, *Leverage dan Sales Growth*, mampu menjelaskan sebesar 6,9 % Variasi Variabel Tax Avoidance dan 93,1% dijelaskan oleh Variabel lain atau menambah variabel yang sudah ada dan dilakukan penelitian kembali bagi peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zaenal dan Nina Rachmawati. (2006). "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Efektifitas Mekanisme Pengurang Masalah Agensi". *Jurnal Siasat Bisnis* Volume 1. No. 3. Hal 237-247.
- Basu Swastha dan T. Hani Handoko. *Manajemen Pemasaran (Analisa. Perilaku Konsumen)*, Yogyakarta : BPFE UGM. 2001.
- Budiman, J.,& Setiyono.2012. *Pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax avoidance)*. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.
- Calvin Swingly, I Made Sukartha. 2015. *Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Sales Growth Pada Tax Avoidanc*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10.1 (2015): 47-62. Issn: 2302-8556
- Carolina, V. dan T. H. Simanjuntak. 2011. *Pengaruh Tax Knowledge dan Persepsi Tax Fairness terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Madya Bandung. Prosiding Seminar Nasional "Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)"*.
- Deitiana, Titi. "Pengaruh Rasio Keuangan, Pertumbuhan Penjualan dan Dividen Terhadap Harga Saham". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol.13 No.1*. STIE Trisakti. 2011.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati. 2014. "Pengaruh Karakter Ekdektif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia". ISSN: 2302-8556. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.2 (2014):249-260.
- Dyrenge, et al., (2010). *The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance*.The Accounting Review, 85, 1163-1189.
- Hardiningsih, Pancawati, "Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Voluntary Disclosure Laporan Tahunan Perusahaan", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol 15 No. 1*, 2008.
- Hartadinata Dan Heru Tjaraka (2013).. Tahun XXIII, No. 3 Desember 2013
- Hoque, Zahirul and Adams, Carol. 2011. *The Rise and Use of Balanced Scorecard Measures in Australian Government Departments*. Financial Accountability of Management. 27 (3). Pp 308-331.
- I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana (2016). *Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance*. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.15.1 April (2016): 584-613
- Jaya, Arafat, dan Kartika. 2013. *Corporate Governance, Konservatisme Akuntansi dan Tax Avoidance*. *Jurnal FE Universitas Negeri Jakarta*, Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.

- Jensen, M. and W.H. Mackling, 1976, *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*, Journal of Financial Economics, 3, 305-360.
- Khurana, I. K. dan W. J. Moser. (2009). *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*. Didapat dari: [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com).
- Kim, Chansog (Francis), and Liandong Zhang. 2013. Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *City University of Hong Kong*
- KNKG. 2004. *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*. Jakarta
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta: Andi Yogyakarta
- Martono dan Agus Harjito. 2006. *Manajemen Keuangan*. Edisi Kedua, Yogyakarta: Ekonisia
- Muljono, Djoko. 2009. *Tax Planning Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Yogyakarta: ANDI
- Nurul Hidayah, 2015. *Pengaruh Perusahaan Keluarga, Multinational Company, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012)*. Jom FEKON Vol.2 No.2 Oktober 2015
- Pohan, H. T. (2008). *Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin's q, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik*. Internet, 4 November 2013 diakses dari <http://hotmanpohan.blogspot.com> pada tanggal 23 Januari 2018.
- Silvia Ratih Puspita, Puji Harto. *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*. Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014, Halaman 1-13 Issn (Online): 2337-3806
- Sunjoyo, dkk. (2013). *Aplikasi SPSS untuk Smart Riset*, Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, Eko dan Falikhatun, "Pengaruh Tangibility, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Keuangan". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* Vol. 10, No. 1, 13-22. 2008.
- Tarjo. 2008. *Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham, serta Cost of Equity Capital*. Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak
- Wahyu Hidayat, Wastam. 2018. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia*. Vol.3, No.1, Februari 2018: 19 - 26 P-Issn 2527-7502 E-Issn 2581-2165
- Watts, Ross L. dan Jerold L. Zimmerman (1986). *Positive Accounting Theory*. USA: Prentice-Hall.